

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, Sufmi Dasco, Muhammad Asrun, dan Abdu Rahmat Royadi. Sejarah Peradilan di Indonesia, Bogor: IPB Press. 2021.
- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. ed. oleh Leny Wulandari. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Arto, Mukti. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. Kebebasan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press. 2005.
- Basah, Syahrani. Laporan Penelitian Peradilan Administrasi Negara. Jakarta: Binacipta. 1977.
- Diantha, I Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Kencana. 2017.
- Efendi, Jonaedi. Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim. Jakarta: Kencana. 2018.
- F., Indriana. Pemilu di Indonesia. ed. oleh Alfrida. Tangerang: Loka Aksara. 2019.
- Feith, Herbert. Pemilihan Umum 1955 di Indonesia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 1999.
- Gaffar, Afan. Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2000.
- Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata. 2 (ed). Jakarta: Kalola Printing. 2017.
- Hoesein, Zainal Arifin dan Arifudin. Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Mangkoedilaga, Benjamin. Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.

- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.
- Muhjad, M. Hadin. Beberapa Masalah Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo CV. 1985.
- Nurhadi. Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat dari Beberapa Sudut Pandang. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2011.
- Nuryanto A. Daim, Hukum Administrasi Perbandingann Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Surabaya: Laksbang, 2014).
- Pamungkas, Sigit. Perihal Pemilu. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. 2009.
- Prasetyo, Teguh. Filsafat Pemilu. Bandung: Nusamedia, 2018.
- Rachman, Anwar. Hukum Perselisihan Partai Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2016.
- Samsudin, dkk. Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi. Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor. 2020.
- Sunarso. Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia). Yogyakarta: UNY Press. 2015.
- Suteki dan Galang. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik). Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2020.
- Whare, K. C. Konstitusi-Konstitusi Modern. Surabaya: Pustaka. 2003.

B. Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. UU No. 48 Tahun 2009. LN No. 157 Tahun 2009. TLN No. 5076.
- Indonesia. Undang-Undang Partai Politik. UU No. 2 Tahun 2008. LN No. 2 Tahun 2008. TLN No. 4801.
- Indonesia. Undang-Undang Pemilihan Umum. UU No.7 Tahun 2017. LN No. 182 Tahun 2017.

Indonesia. Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum. UU No. 15 Tahun 2011. LN No. 101 Tahun 2011. TLN No. 5246.

Indonesia. Undang-Undang Peradilan Umum. UU No. 2 Tahun 1986. LN No. 20 Tahun 1986. TLN No. 3327.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

C. Jurnal

Amal, B. "Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Studi Atas Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 004/REG.LG/DPRD/12.00/VIII/2018)." *Masalah-Masalah Hukum* 48.3 (2019): 13. doi: <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.306-31>

Amrynudin, Anin Dhita Kiky. "Implikasi dan Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mengenai Putusan Penundaan Pemilu 2024." *Info Singkat*, 25.5 (2023): 7.

Asshiddiqie, Jimly. "Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi." *Jurnal Konstitusi* 3.4 (2006): 8.

Benni, Erick dan M. Ikhwan. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum & Ilmu Sosial UNDIKNAS* 5.2 (2022): 211. doi: 10.38043/jah.v5i2.3763

Edyanti, Yusrin dan Anna Erliyana. "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaar*) (Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Pemerintahan)." *Dhamarsisya* 2.2 (2022): 733.

Elmendorf, Christopher S. "Election Commissions and Electoral Reform: An Overview." *Election Law Journal*. 5.4 (2006): 425-446.

Hapsari, Elisabeth Putri, Lapon Tukan Leonard, dan Ayu Putriyanti. "Kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Menggunakan Asas Ultra Petita Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 5K/TUN/1992 (Studi Kasus Putusan No. 32/G/2012/PTUN.SMG)." *Diponegoro Law Journal*. 6.2 (2017): 5. doi: <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>.

Perdana, M. T., Alfaris M., dan Iftitah A. "Kewenangan Bawaslu Dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-X

VII/2019.” Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. 10.1 (2020): 8.

Pradika, F. W., Putra H. A., dan Noris A., “Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu yang Ideal di Indonesia.” DIVERSI: Jurnal Hukum 6. 1 (2020): 6. doi: <https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.793>.

Sapri, Rahmat Bijak Setiawan, Yoan Dwi Pratama, dan Axcel Deyong Aponno. “Realisasi Wacana Penundaan Pemilihan Umum (Pemilu): Manifestasi Kontra Indikasi Terhadap Supremasi Konstitusi dan Demokrasi.” Jurnal APHTN-HTN 2.1 (2022): 202-203. doi: 10.55292/japhtnhan.V1i2.

Suadasa, Agun Gunandjar. “Sistem Multipartai di Indonesia.” Jurnal Legislasi Indonesia 5.1 (2008): 10.

Tanthowi, Pramono Ubaid. “Mempertahankan Kemandiri KPU: Antara Produk Legislasi dan Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Pustaka Pemilu 1.1 (2018): 2.

D. Karya Tulis Ilmiah

Aditya, Dausat. “Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia.” PhD skripsi, Universitas Jember, 2018.

Kusuma, Mulyana W. “Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1999.” Juri Ardiantoro (ed.). *Transisi Demokrasi: Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilu 1999*. Jakarta: KIPP 1999.

Pebriyanti, Peni. “Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Atas Pencoretan Daftar Calon Tetap Oleh KPU Provinsi Lampung Perspektif Hukum Islam (Studi Yurisprudensi MA No. 9 P/PAP/2018).” Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2020.

Zain, Faizi. “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Perspektif UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019.

E. Internet

Mubdi, Umar. “Putusan Pengadilan Tanpa Kewenangan,” Kompas. Diakses 29 Februari 2024. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/03/12/putusan-pengadilan-tanpa-kewenangan>.

Prambadi, Gilang Akbar. "Pakar Nilai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tunda Pemilihan Umum Bercorak Ultra Vires." *Republika*. co. id. Diakses 21 Maret 2024.
<https://news.republika.co.id/berita/rqxe5o456/pakar-nilai-putusan-pn-jakpus-tunda-pemilu-bercorak-ultra-vires>.